

ISU STRATEGIS DALAM KTT KE-35 ASEAN DAN POSISI INDONESIA

7

Lisbet

Abstrak

Pada tanggal 2-4 November 2019, KTT ke-35 ASEAN telah diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi pokok pembahasan, baik yang terkait dengan isu ekonomi maupun isu politik - keamanan. Tulisan ini hendak mengkaji isu strategis dan posisi Indonesia terhadap isu tersebut. Pada isu ekonomi, para Pemimpin ASEAN membahas tentang perkembangan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan belum terselesaikannya perang dagang Amerika Serikat dan China. Sedangkan pada isu politik - keamanan, ASEAN membahas isu-isu Rohingya dan Laut China Selatan. Posisi Indonesia terhadap isu tersebut adalah mendukung segala upaya penyelesaian agar mendapatkan jalan keluar sehingga kondisi perekonomian seluruh negara anggota ASEAN dapat meningkat dan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN dapat terjaga dengan baik. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR RI perlu mengawal dan memastikan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan dapat berjalan dengan baik.

Pendahuluan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN merupakan forum terpenting di ASEAN karena merupakan forum tertinggi yang dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya. KTT ke-35 ASEAN telah diselenggarakan pada tanggal 2-4 November 2019 di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis serta persoalan lain yang menjadi perhatian bersama di kawasan.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga hadir pada KTT ini membawa misi Indonesia, yakni mengupayakan penguatan *strategic trust* (rasa saling percaya) di antara negara-negara ASEAN dan memberikan penekanan pentingnya kerja sama Indo-Pasifik, terutama terhadap peningkatan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Integrasi dalam meningkatkan konektivitas memiliki peran krusial karena dapat mendorong peningkatan perdagangan di kawasan sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.



Kawasan Asia Pasifik saat ini telah tumbuh menjadi pusat perebutan pengaruh geopolitik negara-negara adidaya dan menjadi pusat gravitasi perekonomian global. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang jarang dimiliki oleh negara lain di Asia Pasifik, yakni posisi geografis yang sangat strategis dan jumlah penduduk yang besar serta sumber daya alam melimpah.

Untuk menjaga stabilitas kawasan, Presiden Joko Widodo juga mengajak para pemimpin negara ASEAN dan China untuk memperkuat kemitraan. Kerja sama ASEAN-China diharapkan bisa menjadi lokomotif terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Pada Juni 2019 ASEAN telah mengesahkan “*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*” dan diadopsi oleh semua negara ASEAN. *Outlook* ini berfungsi untuk mendorong semua negara di kawasan agar mengedepankan kolaborasi serta menanggalkan rivalitas.

Inisiatif Indonesia untuk menyusun *outlook* ini juga diapresiasi oleh Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, karena sejalan dengan visinya. Dukungan India diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara melalui perdagangan komoditas sawit. PM Modi menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlakuan adil terhadap ekspor sawit dari Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji isu strategis terkait ekonomi dan politik-keamanan apa saja yang dibahas dalam KTT ke-35 ASEAN dan bagaimana posisi Indonesia terhadap isu tersebut?

Isu ekonomi

Isu ekonomi yang menjadi fokus perhatian pada KTT ini adalah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*) serta perkembangan perang dagang Amerika Serikat dan China. RCEP diluncurkan dalam KTT ke-21 ASEAN pada tahun 2012. Pada KTT tersebut, ASEAN yang didukung oleh ke-6 negara mitra yang memiliki *Free Trade Agreement* seperti China, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan India, telah menyepakati *Guiding Principle for Negotiating RCEP*. RCEP memiliki tujuan untuk mendorong kemajuan industri dari negara-negara ASEAN serta ke-6 mitranya dalam rantai pasok kawasan (*regional value chain*).

Pada KTT Ke-35 ASEAN, isu ini pun kembali dibahas agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Selain Indonesia, Thailand melalui PM Prayut Chan-Ocha sering menyerukan agar kesepakatan RCEP dapat terealisasi tahun ini agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Perundingan RCEP ini nantinya akan menjadi dasar bagi integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur.

Meskipun para pemimpin ASEAN mengetahui arti penting RCEP, namun pada akhirnya mereka sepakat untuk menunda pengesahan Pakta Perdagangan ke bulan November 2020 karena adanya tuntutan baru dari India. India menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak yang akan diterima oleh bisnis lokalnya jika barang-barang murah China mudah masuk ke India. Sementara di sisi lain, China menganggap bahwa dengan adanya

perjanjian ini, maka China mampu meningkatkan integrasi ekonomi regionalnya dengan ASEAN.

Selain perkembangan isu RCEP, isu ekonomi lain yang dibahas pada KTT ini adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Para pemimpin ASEAN menyadari bahwa dengan semakin berlarutnya perang dagang AS dan China, maka semakin dibutuhkan kehadiran komitmen kerja sama multilateral di bidang perdagangan dan investasi. Sayangnya pada KTT ASEAN-AS di Bangkok, yang masih merupakan rangkaian kegiatan dari KTT ke-35 ASEAN, perwakilan AS yang hadir posisinya lebih rendah daripada tahun lalu. Perwakilan AS di KTT ASEAN tahun ini hanya pada level menteri, yakni Menteri Perdagangan Wilbur Ross dan Penasihat Keamanan Gedung Putih Robert O'Brien.

Keputusan AS ini disayangkan oleh tujuh pemimpin ASEAN. Mereka pun mengimbangnya dengan mengirimkan menteri luar negerinya masing-masing, termasuk Indonesia. Hanya tiga kepala pemerintahan saja yang hadir pada pertemuan tersebut, yakni Thailand, Vietnam, dan Laos. Padahal KTT ASEAN-AS ini merupakan Forum untuk para pemimpin ASEAN dan pemimpin dari negara mitra wicara untuk duduk bersama dan membahas isu-isu di kawasan. Sama halnya KTT ASEAN dengan negara mitra wicara lainnya seperti dengan China, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Rendahnya level yang menjadi perwakilan AS pada KTT ASEAN-AS menandakan bahwa hubungan AS dan ASEAN menjadi renggang. Fokus perhatian

AS di ASEAN hanya terhadap rivalitasnya dengan China. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pengaruh AS di ASEAN sudah semakin berkurang jika dibandingkan dengan China. Padahal AS merupakan salah satu mitra dagang terpenting di ASEAN dan bisa menjadi penyeimbang terhadap pengaruh China di kawasan ASEAN.

Isu Politik-Keamanan

Pada KTT ke-35 ASEAN, para pimpinan ASEAN dan utusan PBB juga memberi perhatian pada isu etnis Rohingya yang terusir dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Setidaknya terdapat 740 ribu etnis Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine, Myanmar, dan mengungsi ke Bangladesh pasca-kerusuhan Agustus 2017 (*Republika*, 4 November 2019). Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal dengan dalih untuk menangkap gerilyawan Arakan *Rohingya Salvation Army* (ARSA). Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau di tempat penampungan dan menggantungkan hidupnya pada bantuan internasional. Investigator PBB telah menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya adalah serupa genosida.

Para pemimpin ASEAN terus mendorong agar penanganan pengungsi Rohingya mencapai kemajuan. Repatriasi pengungsi Rohingya secara sukarela, aman, dan bermartabat diharapkan dapat segera dilaksanakan, dan ASEAN menyatakan kembali kesiapannya

untuk membantu. ASEAN telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ad hoc yang akan memantau pelaksanaan rekomendasi dari *Preliminary Need Assessment (PNA) Team*. Pada Maret 2019, PNA sudah memberikan rekomendasi dan pada bulan Oktober 2019 sudah dilakukan pertemuan *technical working group* dan menghasilkan beberapa prioritas yang akan ditindaklanjuti untuk membantu persiapan repatriasi. ASEAN memang perlu memiliki satuan tugas yang dapat memantau secara penuh implementasi rekomendasi PNA. Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN sudah menyepakati pendirian *ad hoc task force*.

Dengan adanya dukungan ASEAN maka Sekjen PBB dapat mendesak Myanmar untuk menjamin kepulangan etnis Rohingya dalam keadaan aman. Myanmar perlu bertanggung jawab untuk menjamin lingkungan yang kondusif bagi pengembalian pengungsi Rohingya secara bermartabat dan berkelanjutan. Myanmar sebelumnya telah bersedia menerima kembalinya pengungsi Rohingya tetapi masih belum bersedia memberikan status kewarganegaraan penuh. Myanmar juga mensyaratkan para anggota etnis Rohingya bersedia hidup di Rakhine dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Sejauh ini hanya ratusan yang telah kembali ke Rakhine. Sebagian besar pengungsi masih takut terhadap persekusi yang terjadi di negeri dengan mayoritas pemeluk agama Budha tersebut. Sekjen PBB juga meminta Myanmar menjamin pemberian akses tidak terbatas bagi pekerja kemanusiaan di Rakhine terkait

pemulangan pengungsi.

Selain isu Rohingya, isu politik-keamanan lain yang dibahas adalah isu Laut China Selatan. Pada KTT ASEAN ini, China telah menyampaikan dukungannya terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN. China juga menyambut baik adanya kemajuan dalam negosiasi *Code of Conduct (CoC)*. CoC bermanfaat untuk mencegah timbulnya konfrontasi bersenjata di Laut China Selatan. Tidak hanya itu, China pun menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan ASEAN terkait Laut China Selatan.

Respons positif China ini disambut baik oleh seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Filipina. Filipina mengapresiasi dukungan China yang menghendaki agar stabilitas keamanan di kawasan ASEAN tidak terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa China bersedia untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan militer, karena apabila China tidak menyetujui kode etik tersebut maka akan timbul instabilitas keamanan di kawasan ASEAN.

Posisi Indonesia

Indonesia memiliki posisi penting dalam pembahasan setiap isu-isu strategis tersebut. Pada setiap isu, Indonesia mengambil posisi mendukung upaya bersama dalam mencari solusi. Pada isu RCEP, Indonesia memang menyetujui penundaan pengesahan RCEP, namun sangat menyayangkan keputusan tersebut. Sejak tahun 2012, Indonesia selaku koordinator RCEP telah berupaya maksimal untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Indonesia ditunjuk

sebagai negara koordinator dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, ditunjuk sebagai Ketua Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiating Committee*) RCEP dan Ketua Perundingan ASEAN. Presiden Jokowi menekankan bahwa RCEP ini memiliki arti penting tidak hanya bagi ASEAN, tetapi juga bagi semua negara yang ikut serta di dalamnya karena RCEP akan menguntungkan rakyatnya masing-masing.

Selain itu, RCEP juga akan menjadi blok ekonomi terbesar dibandingkan dengan Uni Eropa dan Kemitraan Trans-Pasifik. Produk Domestik Bruto dari Kemitraan ini diperkirakan mencapai 27 triliun dollar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Uni Eropa yang sebesar 18 triliun dollar AS, atau Kemitraan Trans-Pasifik yang sebesar 11 triliun dollar AS (*Kompas*, 4 November 2019). Tidak hanya itu, Presiden Jokowi secara tegas mengharapkan agar India tetap bergabung dalam RCEP.

Selain itu, apabila Pakta Perdagangan RCEP disahkan maka Indonesia akan memperoleh keuntungan. Indonesia akan memiliki peluang besar bagi terbukanya akses pasar ekspor produk unggulan dan masuknya arus investasi di sektor industri yang bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan kawasan sebagai tujuan ekspor dan sumber input bagi industri yang sedang tumbuh.

Selain dukungan pada upaya penyelesaian isu ekonomi, Indonesia juga mendukung upaya penyelesaian pada isu politik-keamanan. Terkait isu Rohingya, Indonesia telah memosisikan dirinya untuk terus

meningkatkan upaya penyelesaian lobi agar tidak terjadi lagi kekerasan di Negara Bagian Rakhine pada masa mendatang. Dalam sesi pleno, Indonesia telah memberikan penegasan terhadap upaya pemulihan situasi dan keamanan di Rakhine. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui langkah repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat bagi para pengungsi di Negara Bagian Rakhine. Untuk itu, Indonesia akan menyiapkan diri dan berkontribusi jika *ad-hoc task force* telah berdiri.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah melanjutkan dialog dengan para perwakilan pengungsi yang saat ini berada di Cox's Bazaar, Bangladesh. Posisi Indonesia terhadap isu ini juga disampaikan pada saat pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres. Pada pertemuan bilateral tersebut, Indonesia menyatakan kesediaannya untuk secara aktif berkontribusi dalam upaya penyelesaian terhadap isu tersebut.

Terkait isu politik-keamanan di Laut China Selatan, Indonesia pun menyampaikan posisinya yang mendukung segala upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian serta keamanan di Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga menghimbau kepada semua pihak agar mematuhi hukum internasional karena hal ini penting bagi terjaganya stabilitas keamanan Laut China Selatan.

Penutup

KTT ASEAN merupakan forum yang penting di kawasan Asia Tenggara, sehingga Indonesia berkepentingan untuk hadir. Indonesia berkepentingan agar isu-isu strategis yang dibahas

pada KTT Ke-35 ASEAN dapat memperoleh jalan keluar, baik terkait isu ekonomi maupun politik dan keamanan, dengan harapan kondisi perekonomian negara-negara ASEAN dapat meningkat serta stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN pun dapat terjaga dengan baik. Dalam kerangka ini, DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu ikut mengawal dan memastikan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan dapat berjalan dengan baik.

Referensi

“ASEAN Tunda Pengesahan Pakta Perdagangan”, *Suara Pembaruan*, 3 November 2019, hal. 15.
 “ASEAN Soroti Rohingya”, *Republika*, 4 November 2019, hal. 1.
 “Asia Menentukan Nasibnya”,

Kompas, 6 November 2019, hal. 5.
 “Inisiatif “Outlook Indo-Pasifik” Indonesia Diapresiasi”, *Suara Pembaruan*, 3 November 2019, hal. 15.
 “Jokowi Dorong Konektivitas Indo-Pasifik”, *Republika*, 3 November 2019, hal. 1.
 “Pakta Dagang RCEP akan hadir di 2020”, *Media Indonesia*, 6 November 2019, hal. 2.
 “Para Pemimpin Terus Upayakan Stabilitas”, *Kompas*, 4 November 2019, hal. 1 dan 11.
 “RCEP Dimatangkan”, *Republika*, 4 November 2019, hal. 9.
 “Renggangnya Hubungan ASEAN-AS”, *Kompas*, 6 November 2019, hal. 6.
 “RI Berperan Penting Terkait Rohingya”, *Republika*, 4 November 2019, hal. 9.



Lisbet
lisbet.sihombing@dpr.go.id

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.